

16. DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a) Tujuan

Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

b) Sasaran

- Terwujudnya Pendapatan Daerah yang memadai, yang mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pembangunan dan pelayanan public dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah;
- Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik melalui pengembangan sarana dan prasarana, sistem dan prosedur yang berkelanjutan (sustainable) berbasis teknologi informasi;
- Sosialisasi Pemungutan Pajak Daerah

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 86.538.486.707,00 dengan realisasi sebesar Rp 79.213.795,00 (91,54%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan :

- Tercapainya Realisasi Pendapatan Tahun 2011 Melalui Optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah:

Perkembangan PAD Jawa Timur Tahun 2010-2011

NO.	URAIAN	2010		2011	
		Target (Rupiah)	Capaian (Rupiah)	Target (Rupiah)	Capaian (Rupiah)
1	PKB	2.000.000.000.000	2.269.949.059.238	2.610.000.000.000	2.692.581.786.332
2	BBNKB	2.240.000.000.000	2.513.509.418.955	3.150.000.000.000	3.366.144.231.100
3	PBBKB	950.000.000.000	1.081.269.923.495	1.103.000.000.000	1.217.228.864.294,52
4	PAP	16.000.000.000	21.423.691.432	18.000.000.000	22.369.928.534
5	PABT	16.150.000.000	21.191.745.492	-	-
6	Retribusi Jasa Usaha (RTLKHH)	1.500.000.000	1.470.772.885	1.500.000.000	2.812.741.144
7	Pendapatan denda pajak	-	91.585.780.265,94	-	19.276.323.488
8	Pendapatan Lain-lain	11.000.000.000	16.146.641.162	15.000.000.000	19.011.739.341
JUMLAH		5.334.650.000.000	6.016.547.032.924,94	6.897.500.000.000	7.339.425.614.233,52

- Pembangunan 11 Samsat Payment Point untuk pelayanan pembayaran PKB di beberapa wilayah UPT;
- Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan melalui Media Elektronik, Media Cetak, Pamflet, Spanduk, Brosur, Tatap muka.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan :

- Masih tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh :
- Kendaraan dalam Status leasing yang ditarik karena menunggak
- Kendaraan Hilang atau rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi
- Jarak domisili wajib pajak dengan Samsat Induk relatif masih jauh
- Kesadaran wajib pajak yang masih rendah

Upaya Pemecahannya :

- Melakukan pendekatan kepada perusahaan leasing apabila kendaraan yang telah ditarik tersebut dilelang maka pajak-pajak dapat di dahulukan sebagaimana amanat undang-undang

- Intensitas Pelayanan Samsat Keliling untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam membayar PKB
- Membangun Payment Point pada lokasi strategis dan potensial
- Sosialisasi perpajakan kepada tokoh masyarakat

f) Penghargaan yang telah diterima pada tahun 2011

- KB. Samsat Jember Juara terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Unit Pelayanan Publik Percontohan;
- KB. Samsat Talangagung Malang Selatan kategori baik Tingkat Provinsi *Jawa Timur untuk Unit Pelayanan Publik Percontohan*;

17. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Tujuan

Untuk memfasilitasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung tertib administrasi dan transparansi anggaran daerah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih serta bertanggungjawab.

b) Sasaran

Terlaksananya program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara efisiensi dan efektif berdasarkan target capaian yang telah di rumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

c) Pagu dan realisasi program :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 34.482.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 32.698.540.944,00 atau (94,83 %), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil pelaksanaan pembangunan, antara lain

- Meningkatnya kualitas pengetahuan dan pemahaman Sumber Daya Aparatur terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Meningkatnya kualitas penyusunan pertanggungjawaban keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- Meningkatnya kualitas penyusunan APBD/Perubahan APBD dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur ;

- Mempercepat implementasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ;
- Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD ;
- Tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah dan terlaksananya percepatan sertifikasi aset daerah.

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya

- Adanya peraturan perundang-undangan yang masih bersifat ego sektor sehingga pada tataran pelaksanaan sulit implementasi. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar menjadi lebih baik, maka sebelum membuat peraturan perundang-undangan baru perlu dilakukan kajian yang mendalam serta analisa yang tajam terhadap benefit dan impact apabila peraturan baru tersebut diterapkan dan komunikasi yang lebih intensif antar kementerian dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan ;
- Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
- Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki mindset (pola pikir) simultan, kreatif dan

inovatif terhadap penyusunan program kegiatan, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

a) Tujuan

Untuk memfasilitasi penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang sinkron dengan prioritas dan program nasional, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

b) Sasaran

- Untuk memperoleh data dan informasi guna memberikan penilaian terkait dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Perda APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur supaya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi ;
- Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pembinaan dan pengawasan supaya tercapai tujuan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

c) Pagu dan realisasi program

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.497.310.000,00, dengan realisasi sebesar Rp. 5.365.671.200,00 atau (97,61%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi

- Terlaksananya evaluasi dan meningkatnya kualitas penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Terlaksananya evaluasi dan meningkatnya kualitas penyusunan regulasi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur ;
- Pelaksanaan dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu, serta menurunnya jumlah keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

e) Permasalahan dan upaya pemecahan,:

- Masih ada Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang prioritas program/kegiatannya belum sinkron dengan prioritas program/kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, oleh karena itu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stake holder sebagai tindak lanjut dari hasil MUSRENBANGPROV ;
- Adanya keterlambatan pembahasan rancangan Perda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Eksekutif dengan Legislatif yang berakibat pada terlambatnya penyampaian kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut menyebabkan terlambatnya Penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, atas keterlambatan tersebut Gubernur Jawa Timur

menyampaikan/menerbitkan surat peringatan agar segera dilakukan pembahasan dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi ;

- Masih adanya perbedaan persepsi/pendapat antara Eksekutif dan Legislatif yang berakibat molornya jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, bahkan sampai terjadi dead lock, oleh karena itu telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi alternatif sebagai titik temu, sehingga pembahasan dapat dilanjutkan kembali untuk memperoleh persetujuan bersama.

18. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

a) Tujuan

Untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada dilingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa Timur Taman Mini “Indonesia Indah” Jakarta, baik berupa kendaraan operasional dinas dan peralatan kantor serta rumah tangga.

b) Sasaran

Sarana prasarana dilingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara sebesar Rp. 1.616.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.615.297.000,00 (99,90%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pengadaan 2 unit kendaraan dinas ;
- Pengadaan 3 unit peralatan olahraga ;
- Pengadaan 2 unit mesin pendingin / kulkas ;
- Pengadaan 50 buah kursi rapat.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Adanya kesulitan penyediaan oleh penyedia barang karena terjadi Force Majeur dinegara produsen kendaraan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang ;
- Adanya peraturan dan prosedur tahapan tahapan yang harus dilalui pada waktu proses pengadaan sehingga memakan waktu yang lama.

Upaya pemecahan masalah

Dalam mengatasi keterlamabatan pengiriman barang dari produsen kita selalu melakukan koordinasi dengan agen yang ada di Indonesia sehingga bisa selalu mengetahui perkembangan stock barang yang ada di Agen.

2. Program Peningkatan Kerjasama.

a) Tujuan

- Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Departemen, Non Departemen dan Perwakilan Negara Asing) serta pelayanan para pejabat/petugas Pemerintah Propinsi serta Pimpinan dan anggota DPRD dari Jawa Timur.
- Meningkatkan promosi potensi Jawa Timur yang meliputi industri kecil menengah, kerajinan, pariwisata, seni dan budaya di Jabodetabek, melalui event event pameran dan pertunjukan kesenian.

b) Sasaran

- Pejabat - pejabat/petugas Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta Pimpinan dan anggota DPRD dari Jawa Timur yang bertugas ke Jakarta melalui Kantor Perwakilan.
- Para UKM dari Jawa Timur;
- Para pelaku seni Jawa Timuran (seniman) dari Jawa Timur dan Jabodetabek.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kerjasama Kegiatan Peningkatan koordinasi pelayanan keprotokolan dalam rangka kerjasama antara badan/dinas/ lembaga/kantor dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan dengan pemerintah pusat sebesar Rp. 736.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 736.013.300,00 (99,93%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi dan pelayanan pejabat selama di Jakarta;
- Peningkatan fungsi keprotokolan pejabat di Jakarta;
- Peningkatan koordinasi dengan badan / dinas / lembaga / kantor dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur.
- Pergelaran kesenian pada pameran di Jakarta yang dilaksanakan sebanyak 23 kali ;
- Memfasilitasi Pameran Jewelerry dan fashion yang diikuti 4 UKM ;
- Memfasilitasi Pameran IFFINA yang diikuti 2 UKM ;
- Memfasilitasi INACRAFT yang diikuti oleh 2 UKM ;
- Memfasilitasi Pameran Gebyar Wisata yang diikuti 4 UKM ;
- Memfasilitasi PRJ yang diikuti oleh 33 UKM ;
- Memfasilitasi Pameran Interfood Indonesia yang diikuti oleh 2 UKM ;
- Memfasilitasi Pameran Fishsheries yang diikuti 4 UKM ;
- Memfasilitasi Pameran 4 Internasional KSN Expo yang diikuti 3 UKM ;
- Pergelaran kesenian daerah dari Kabupaten / Kota yang diikuti oleh 32 Kabupaten / Kota di Jawa Timur ;
- Mengadakan Festival Reog Ponorogo yang diikuti sebanyak 12 sanggar / grup Reog Ponorogo di Jakarta ;
- Melaksanakan Paket Acara Khusus Pesona Budaya Jawa Timur yang dihadiri oleh 600 tamu undangan ;
- Menyelenggarakan Pelatihan Tari Jawa Timuran yang diikuti oleh 120 peserta ;
- Menyelenggarakan Lomba Tari Jawa Timuran yang diikuti oleh 53 kelompok ;
- Peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 500 undangan ;

- Penyelenggaraan peregeleran wayang kulit Malam satu Suro yang dihadiri oleh 1.000 orang ;
- Penyelenggaran Lomba Makanan Khas Jawa Timur yang diikuti oleh 20 peserta;
- Mengadakan Pelatihan Ketrampilan untuk Pawarta Jatim sebanyak 2 kali ;
- Mengadakan kegiatan jalan sehat dalam rangka peringatan hari pahlawan yang diikuti oleh 500 undangan

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Adanya kesulitan dalam penyediaan kendaraan pada saat-saat banyak pejabat yang bertugas ke Jakarta secara bersamaan ;
- Adanya kesulitan didalam berkoordinasi pada tingkatan tingkatan birokrasi tertentu yang lebih tinggi.
- Adanya beberapa daerah kabupaten/kota yang tidak mengirimkan kesenian ke Jakarta ;
- Jarak tempuh yang jauh untuk UKM sehingga terkadang mereka kurang maksimal dalam mengikuti pelaksanaan pameran .

Upaya pemecahan masalah

- Dalam melaksanakan penjemputan selalu menggunakan skala prioritas untuk pejabat yang dijemput serta melakukan koordinasi yang baik dengan instansi instansi terkait..
- Melaksanakan koordinasi yang lebih baik dengan daerah serta membantu pelaksanaan pameran dengan memberikan informasi yang jelas kepada para UKM.

19. BADAN KOORNINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Tujuan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

b) Sasaran

Peningkatan kemampuan SDM melalui kegiatan in house training pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan sistem pelaporan pelaksanaan kinerja dan keuangan.

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 208.700.000,00 dengan realisasi Rp. 208.069.750,00 (99,70), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terwujudnya operator website yang profesional serta dokumen laporan pelaksanaan kinerja dan keuangan yang akuntabel.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Masih kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan

Upaya Pemecahanya

Peningkatan SDM melalui Bintel tentang keuangan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan.

b) Sasaran

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 36.250.000,00 dengan realisasi Rp. 35.756.000,00 (98,64), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terlaksananya penyusunan LAKIP Bakorwil Madiun.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Meningkatkan kapasitas/kemampuan lembaga dalam rangka memperingati kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

b) Sasaran

Penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 80.000.000,00 dengan realisasi Rp. 79.788.000,00 (99,74)), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terlaksananya Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Tujuan

Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan tugas pelayanan ketentraman dan ketertiban.

b) Sasaran

Pelatihan Banpol PP.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi Rp. 32.334 900,00 (92,39), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terwujudnya Banpol PP yang profesional

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Masih minimnya pengetahuan dan ketrampilan Banpol PP

Upaya Pemecahan

Memberikan ketrampilan dan pelatihan keahlian bidang polisi Pamong Praja

5. Program Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual.

a) Tujuan

Meningkatkan koordinasi, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan yang menyangkut peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta pembinaan mental spritual yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam wilayah.

b) Sasaran

Membantu meringankan beban masyarakat miskin yang ada di wilayah.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual sebesar Rp. 215.300.000,00 dengan realisasi Rp. 208.895.500,00 (97,03), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Masih adanya keluarga RTSM yang belum terjangkau dengan kegiatan ini

Upaya Pemecahan

Menambah jangkauan penyelenggaraan pasar sembako murah

6. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan tugas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

b) Sasaran

- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi data administrasi wilayah;
- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pembangunan ekonomi;
- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan program kemasyarakatan;
- koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana ;

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan sebesar Rp. 1.634.750.000,00 dengan realisasi Rp. 1.622.963.481,00 (99,28), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan ekonomi, program kemasyarakatan, program pengembangan sarana dan prasarana serta terwujudnya data administrasi wilayah.

7. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

a) Tujuan

Meningkatkan koordinasi antar aparaturn daerah di wilayah.

b) Sasaran

Fasilitasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPAN).

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi Rp. 39.115.880,00 (97,79), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Terjalannya komunikasi antar Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kerjasama antar penyelenggara Pemerintah di daerah khususnya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Belum optimalnya komunikasi antar Aparatur Negara

Upaya Pemecahan

Diadakan pertemuan antar penyelenggara Pemerintah di daerah

8. Program Peningkatan Kerjasama.

a) Tujuan

Meningkatkan program kerjasama antar daerah di wilayah.

b) Sasaran

- Fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah di wilayah;
- Pemeliharaan gedung kantor;
- Fasilitasi kerjasama antar Kab/Kota dan Provinsi dengan Kab/Kota ;
- Identifikasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan;

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kerjasama sebesar Rp. 750.000.000,00 dengan realisasi Rp. 731.958.525,00 (97,59), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Terasilitasinya penyelesaian perselisihan antar daerah di wilayah ;
- Terlaksananya perbaikan gedung kantor ;
- Terasilitasinya kerjasama antar daerah di wilayah;
- Terselenggaranya Pra Musrenbang Tingkat Bakorwil ;

20. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BOJONEGORO

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a) Tujuan

- Mempertemukan dan melakukan komunikasi kepada 11 (sebelas) Kepala SKPD Bidang Pembangunan di Kabupaten Wilayah RATUBANGNEGORO, dengan Kepala SKPD Provinsi Jawa Timur, guna mempersiapkan draft perjanjian kerjasama bidang pembangunan yang belum dilakukan perjanjian kerjasama bidang pembangunan, dan melakukan evaluasi 2 (dua) bidang pembangunan yang sudah dilakukan perjanjian kerjasama.
- Untuk menghasilkan indikasi kegiatan yang memiliki manfaat lintas wilayah merupakan salah satu instrumen penting dalam menyusun indikasi kegiatan dan program pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, setelah sebelumnya melalui tahap pembahasan pada MUSRENBANG Provinsi Jawa Timur.
- Agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat persatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
- Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal bagi masyarakat yang hidup dan berdomisili pada wilayah lintas batas yang bersengketa.
- Melakukan sinkronisasi dan sinergi terhadap program-program pembangunan antara Kabupaten/Kota pada wilayah perbatasan.

b) Sasaran

- Mewujudkan pelaksanaan perjanjian kerja sama 13 (tiga belas) bidang pembangunan antar Kabupaten di Wilayah RATUBANGNEGORO sesuai

dengan hasil kesepakatan bersama antara Bupati Blora, Bupati Tuban, Bupati Rembang dan Bupati Bojonegoro, yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2006.

- Dengan diadakannya pelaksanaan Pra MUSRENBANG Provinsi Jawa Timur mampu menghasilkan struktur program partisipatif dan diharapkan akan mampu menterjemahkan instrumen-instrumen prioritas untuk menghasilkan struktur program yang solutif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini.
- Jalan dan jembatan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi sosial budaya serta lingkungan dan di kembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah.
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengkomunikasikan secara arif dan bijaksana dalam suasana kebersamaan serta melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL Bojonegoro, sesuai PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.380.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 2.345.844.794,00 (98,56%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta Sosial Ekonomi antar Kabupaten di Wilayah Ratubangnegoro. Dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah perbatasan JATIM – JATENG.

- Terisentifikasinya usulan program dan kegiatan prioritas berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah antara Kabupaten/Kota se Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro sebagai aspirator dengan SKPD Provinsi Jawa Timur.
- Meminimalisir kerusakan jalan, mengurangi kesemrawutan transportasi dan mengurangi nilai angka kecelakaan.
- Tercapainya penyelesaian penetapan batas daerah, dan penyelesaian sengketa perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri, serta penyelesaian sengketa perbatasan sengketa kawasan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar (sudah difasilitasi Kementerian Dalam Negeri).

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Belum terlaksananya perjanjian kerja sama 11 (sebelas) bidang pembangunan, antara lain :
 - Bidang Pertambangan dan Energi;
 - Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - Bidang Ketenagakerjaan;
 - Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Bidang Sosial;
 - Bidang Penataan Ruang;
 - Bidang Pekerjaan Umum;
 - Bidang Perhubungan;
 - Bidang Lingkungan Hidup;
 - Bidang Pariwisata.

- Dengan adanya MUSRENBANG diharapkan agar di tingkat desa/kelurahan melaksanakan semaksimal mungkin, karena selama ini belum dilaksanakan secara optimal.
- Tidak adanya lampu penerangan jalan, kondisi jalan gelap gulita sehingga berdampak pada kecelakaan lalu lintas.
- Masih ada beberapa kab/kota yang belum menyelesaikan penetapan batas daerah, hal ini karena belum tersedianya anggaran dari masing-masing Kab/Kota, serta masih terdapatnya kesenjangan sosial masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan fasilitasi antar kabupaten di Wilayah RATUBANGNEGORO untuk segera menyelesaikan penanda tanganan 11 (sebelas) bidang pembangunan yang belum terlaksana, agar implementasi perjanjian kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan kerjasama antar daerah.
- Pra MUSRENBANG Provinsi Jawa Timur diharapkan menghasilkan indikasi kegiatan yang memiliki manfaat lintas wilayah merupakan salah satu instrumen penting dalam menyusun indikasi kegiatan dan program pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.
- Dari sisi kondisi jalan, maka untuk jalan provinsi telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan yang dilaksanakan oleh 3 UPT Binamarga Jawa Timur se Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro, dengan hasil saat ini sudah dalam kondisi 100% sedangkan untuk kondisi jalan nasional khususnya pada ruas jalan Lamongan-Babat pada saat ini dalam proses perbaikan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota yang lain untuk bersama-sama melakukan penegasan batas daerah agar tidak terjadi sengketa perbatasan serta melakukan sinkronisasi pembangunan

infrastruktur/sarana dan prasarana agar tidak terjadi kesenjangan sosial bagi masyarakat yang hidup diwilayah perbatasan.

2) Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

a) Tujuan

Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan Pelayanan Publik dan menghimpun permasalahan atau kendala-kendala terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, untuk dicarikan jalan atau solusi terbaik dalam upaya peningkatan Pelayanan Publik di daerah, serta mengupayakan penghargaan Citra Bakti Abdi Negara dari Pemerintah Pusat.

b) Sasaran

Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Publik di daerah, melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Kab/Kota yang telah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dalam masyarakat.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 120.044.846,00 (96,04%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik dalam memperoleh standard ISO dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik, serta meningkatkan indek kepuasan masyarakat (IKM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahanya

Permasalahan

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan Pelayanan Publik yang maksimal terhadap masyarakat, serta perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Aparat yang melaksanakan kegiatan di Unit-unit Pelayanan Publik.

Upaya Pemecahan Masalah

Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih berkualitas dan memadai serta memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap Aparat yang melakukan pelayanan publik agar indeks kepuasan masyarakat dapat dicapai dan menekan seminimal mungkin keluhan masyarakat kepada unit pelayanan publik di wilayah.

3) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian.

a) Tujuan

Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan penanganan dan kesiapan masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka mengantisipasi pencegahan serangan hama/penyakit tanaman, dampak dan solusinya juga akan membahas perencanaan pembangunan sektor pertanian, dengan harapan dan tujuan untuk mengetahui sejauhmana target produksi sektor pertanian dan solusi pencapaian serta kebijakan, strategi masa tanam tahun 2012 guna menopang Ketahanan pangan Nasional dan daerah.

b) Sasaran

Mewujudkan keterpaduan kegiatan dalam rangka pencegahan serangan hama/Penyakit Tanaman serta pencapaian target produksi pada masa tanam tahun 2012.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan Realisasi

Rp. 67.648.700,00 (96,64%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan serangan hama/penyakit tanaman untuk meminimalisasi gagal panen, serta untuk mengetahui target produksi pertanian masa tanam tahun 2012.

e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan

Sering terjadinya perubahan iklim yang ekstrem sehingga menimbulkan berbagai hama/penyakit tanaman.

Upaya Pemecahan

Melakukan pengamatan secara intensif, apabila ditemukan serangan WBC berikan tanda pada daerah serangan tersebut dan segera diikuti laporan peringatan dini yang ditujukan kepada Mantri Tani, Penyuluh setempat, dan koordinator POPT di Kabupaten.

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi Dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Mental Spiritual

a) Tujuan

Mengajak seluruh masyarakat, baik pengusaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan serta organisasi wanita untuk ikut berpartisipasi meringankan beban masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan atau sejenisnya dalam bentuk menyediakan dan menjual barang yang lebih murah dari pada harga di pasar.

b) Sasaran

- Masyarakat kurang mampu/miskin yang tidak berpenghasilan.
- Masyarakat kurang mampu/miskin yang berpenghasilan rendah.

- Masyarakat kurang mampu/miskin yang belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- Masyarakat kurang mampu/miskin yang belum optimal mengakses pelayanan dasar.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi Dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Mental Spiritual sebesar Rp. 435.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 432.684.625,00 (99,47%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan pasar sembako murah.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota sehingga ada yang tidak mendapat jatah karena terbatasnya paket yang tersedia.

Upaya Pemecahan Permasalahan

Meningkatkan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk memperoleh data penduduk miskin sehingga tepat pada sasaran.

5) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

a) Tujuan

Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program-program pembangunan pedesaan dari Pemerintah Pusat (PNPM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bantuan Keuangan Desa) dan Pemerintah Kab/Kota (Alokasi Dana Desa) agar dilakukan secara sinergi. Serta mendorong kepada Pemerintah Desa/Kelurahan agar meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa/Kelurahan melalui peningkatan pemberdayaan

masyarakat dan melaksanakan kesiapan terhadap program pelayanan E-KTP (KTP Elektronik).

b) Sasaran

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Prasarana, dan Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan, serta meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa melalui progra-program pembangunan yang diberikan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, sebesar Rp. 220.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 219.132.180,00 (99,61%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program / Kegiatan

Meningkatnya pelaksanaan Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan publik pada Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Desa/Kelurahan.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Penyediaan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang disediakan oleh APBD Kabupaten belum memadai, sehingga kinerja untuk pemberdayaan masyarakat Pedesaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, jembatan Desa banyak yang rusak, sehingga akses untuk perhubungan darat antar Desa terganggu.

Upaya Pemecahan

Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang sudah ditentukan skala prioritasnya sehingga betul-betul dirasakan hasilnya oleh masyarakat Pedesaan. Serta melakukan inventarisasi kerusakan

infrastruktur Pedesaan untuk dilakukan pembanunan/pemeliharaan melalui dana dari Pemerintah Pusat (PNPM) Mandiri, dana dari Pemerintah Provinsi (Bantuan Keuangan Desa) dan mengoptimalkan anggaran dari program ADD.

21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a). Tujuan

- Menyajikan Informasi dan Laporan yang cepat, tepat dan akurat terkait dengan sumber-sumber dan potensi Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang melalui aplikasi software yang telah disusun dalam kegiatan Penyusunan Profil Daerah.
- Sebagai bahan informasi dalam menyusun rencana program pembangunan bagi Kabupaten /Kota se wilker BAKORWIL Malang.

b). Sasaran

- Meningkatkan koordinasi dan penyebaran informasi antar Kabupaten/Kota terhadap perkembangan pembangunan dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- Terwujudnya penyediaan data dan informasi bagi Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang dalam bentuk Profil Daerah.
- SKPD Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang sebagai sumber data.

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.350.000,00 (42,70 %), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Tersedianya tenaga/SDM operator sistem sesuai dengan ketrampilan dan kebutuhan yang direncanakan.

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi tenaga/SDM bidang informasi dan teknologi khususnya yang terkait dengan Penyusunan Profil daerah.

e). Permasalahan dan Upaya Pemecahayannya

Permasalahan

- Aplikasi software yang telah disediakan belum dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten/Kota khususnya para petugas operator komputer yang telah memperoleh bintek.
- Petugas operator yang sudah mengikuti bintek sebagian besar telah beralih tugas (mutasi) ke bagian lain sehingga keberlanjutan program menjadi kurang optimal.

Upaya Pemecahannya

- Rencana kedepan petugas operator system komputer yang telah mengikuti bintek terkait dengan penyusunan profil daerah dengan menggunakan informasi dan teknologi akan diberikan peningkatan pemahaman.
- Memanfaatkan sebagian isian penyusunan profil daerah dari berbasis IT dikonversi dengan manual tanpa mengurangi capaian program yang diharapkan yaitu tersedianya buku profil daerah se wilker Bakorwil Malang.

2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a). Tujuan

- Mewujudkan Sinergitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang
- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerinthan dan pembangunan

b). Sasaran

- Terselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan pelaksanaan Pembangunan se Wilayah Kerja BAKORWIL Malang
- Mengimplementasikan hasil sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan yang telah difasilitasi melalui kegiatan pra dan MUSRENBANG se wilker BAKORWIL Malang.

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 454.669.000,00 (90,93 %), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

- Terjalannya Kerjasama Pembangunan di Wilayah BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi dan seleksi dalam rangka pembinaan HIPPA/GHIPPA Kabupaten/Kota se Wilker BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Fasilitasi dan Pemantauan Program CSR di Kabupaten/Kota se Wilker BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Operasional Pengelolaan Bandara Abd. Saleh Malang
- Terlaksananya Fasilitasi , Koordinasi Kerjasama Kegiatan Jalur Lintas Selatan (JLS)
- Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Pengelolaan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Program Adipura

e). Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Belum ditindaklanjuti beberapa program antar daerah di wilker BAKORWIL Malang
- Belum optimalnya pelaksanaan MUSRENBANG ditingkat Kelurahan/Desa

Upaya Pemecahannya

- Meningkatkan koordinasi dan mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama antar daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan se wilker BAKORWIL Malang.
- MUSRENBANG Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mengakomodir usulan program pembangunan Kabupaten/Kota kedalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a). Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung kebijakan terhadap pelayanan yang terkait dengan publik.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang terkait dengan pelayanan publik serta berupaya meningkatkan etos kerja guna mendukung kinerja SKPD dan Kabupaten/Kota se wilker BAKORWIL Malang.

b). Sasaran

- Terselenggaranya fasilitasi monitoring dan evaluasi pelayanan publik
- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam memperoleh pelayanan publik di daerah.

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar Rp. 500.000.000,00 dan Realisasi Rp. 499.999.900,00 (100 %), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
- Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas dan Pemantauan Penanggulangan Bencana Alam
- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Fasilitas dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Peningkatan Informasi Masyarakat
- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitas dan Inventarisasi Permasalahan Pemerintahan Umum, Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat

e). Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Kurangnya tenaga yang berkualitas sesuai dengan standart pelayanan yang dibutuhkan tgerhadap pelayanan public.
- Kurangnya sarana dan prasarana bagi sumber aparatur yang mendukung pelayanan kegiatan publik.

Upaya Pemecahanya

Meningkatkan kualitas aparat sumber daya aparatur yang terkait dengan pelayanan publik melalui bintek dan diklat profesi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, serta memenuhi saranan dan prasarana yang diperlukan.

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

a). Tujuan

Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan jaringan usaha antar koperasi dan antar koperasi dengan BUMD

b). Sasaran

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang perekonomian

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian sebesar Rp. 500.000.000,00 Realisasi Rp. 499.400.000,00 (99,88 %), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Terkoordinasinya kegiatan bidang perekonomian di Wilayah Kerja BAKORWIL Malang
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Agribisnis
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UKM di Jawa Timur
- Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir/Nelayan dapat terlaksana
- Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat sekitar hutan dapat terlaksana

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a). Tujuan

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Wilayah Kerja BAKORWIL Malang

b). Sasaran

Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Bidang Kemasyarakatan

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Realisasi Rp. 968.595.000,00 (99,86%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terkordinasinya kegiatan Bidang Kemasyarakatan dalam hal ini :

- Fasilitasi Perlindungan serta pemberdayaan masyarakat korban bencana
- Program kemiskinan dapat mengarah berkelanjutan sehingga diharapkan jumlah masyarakat miskin akan berkurang
- Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Pariwisata
- Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan
- Terselenggaranya Fasilitasi Pembentukan Jaringan Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama
- Kegiatan Fasilitasi pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan dapat terselenggara
- Terselenggaranya Koordinasi Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

- Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Administrasi Kependudukan
- Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan Monitoring penanganan PMKS

6) Program Peningkatan Kerjasama

a). Tujuan

- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kerja BAKORWIL Malang
- Merumuskan kebijakan Teknis di Wilayah Kerja BAKORWIL Malang
- Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerinth Daerah

b). Sasaran

Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan di bidang pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Kemasyarakatan dan Sarpras (Sarana dan Prasarana)

c). Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatam Kerjasama sebesar Rp. 450.000.000,00 dengan realisasi Rp. 344.129.975,00 (76,47%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d). Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Tersusunnya Laporan Pencapaian Kinerja Bakorwil Malang Tri Wulan - Tersusunnya Rencana Kerja BAKORWIL Malang Th. 2012
- Pelaksanaan Rencana pembangunan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kabupaten / Kota, diharapkan BAPPEDA Kabupaten / Kota sebagai :
- Koordinator pelaksanaan kegiatan Monev Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- Mengawasi kegiatan Monev Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan SKPD Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL Malang
- Memasukkan laporan Monev Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Program SIEVAP BAPPEDA dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
- Dilaksanakannya Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi dengan peserta sebanyak 25 orang
- Dilaksanakannya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta disusunnya laporan Penyelenggaraan Dekon dan TP se wilker BAKORWIL Malang

e). Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Terkait dengan program peningkatan kerjasama, dalam program tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang masing-masing kegiatan mempunyai tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan. Ketiga kegiatan tersebut adalah Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Pemeliharaan Gedung Kantor. Ketika diakumulasikan ketiga kegiatan tersebut yang kurang optimal adalah kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dari pagu Rp. 300.000.000 terlaksana Rp. 209.539.975 atau 69,85%. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan kegiatan mulai dari pelelangan perencanaan, pelelangan fisik mengalami keterlambatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan dan anggaran yang tersedia tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya Pemecahannya:

Mencermati kembali rencana kerja yang telah dibuat khususnya terkait dengan pemeliharaan gedung kantor dengan mempertimbangkan alokasi anggaran, proses pelaksanaan dan alokasi waktu yang tersedia.

22. BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JATIM WILAYAH IV PAMEKASAN

1) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyatukan persamaan persepsi dan tindakan antar kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

b) Sasaran

Sasaran program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah adalah kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

c) Pagu dan Realisasi

Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.976.015.000,00 dengan realisasi Rp. 1.917.489.250,00 (97,04%). secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu :

- Peningkatan kebudayaan antar daerah Bakorwil Pamekasan berupa kegiatan Kerapan Sapi se Madura dalam rangka memperebutkan piala bergilir Presiden RI dan Festival Sapi Sono'.
- Fasilitasi, sinkronisasi dan sinergi program Pembangunan Daerah (Musrenbang) berupa kegiatan rapat koordinasi Pra Musrenbang Bakorwil Pamekasan.
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan ketertiban.

- Koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- Koordinasi, fasilitasi dan monitoring pemberdayaan masyarakat
- Koordinasi , fasilitasi dan monitoring pelestarian lingkungan hidup energi dan sumber daya alam.

2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah berupa kegiatan memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 66 yang bertujuan untuk memeriahkan serta meningkatkan silaturahmi baik di kalangan pegawai Bakorwil Pamekasan maupun antar pegawai Bakorwil Pamekasan dengan pegawai dilingkungan UPT Provinsi Jawa Timur yang berada di Pamekasan.

b) Sasaran

Kegiatan peringatan Hari Jadi Provisi Jawa Timur ke 66 mengikut sertakan para pegawai Bakorwil Pamekasan dan pegawai dilingkungan UPT Provinsi Jawa Timur yang berada di Pamekasan.

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi Rp. 39.494.400,00 (98,74%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan

Kegiatan memperingati Hari Jadi Provisi Jawa Timur ke 66 dilaksanakan di Bakorwil Pamekasan mulai tanggal 5 s/d 14 Oktober 2011 diikuti oleh pegawai Bakorwil Pamekasan dan pegawai dilingkungan UPT Provinsi Jawa Timur yang berada di Pamekasan.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Volly Ball dengan kejuaraan :
 - Juara I : UPT Bina Marga Pamekasan;
 - Juara II : UPT PSAWS Madura di Pamekasan;
 - Juara III : UPT Panti Sosial Remaja Terlantar Pamekasan.
- Lomba Tarik Tambang dengan kejuaraan :
 - Juara I : UPT Dinas Pendapatan Pamekasan;
 - Juara II : Bakorwil Pamekasan;
 - Juara III : UPT BP4 Pamekasan
- Pertandingan Tenis Meja dengan kejuaraan :
 - Juara I : UPT Dinas Pendapatan Pamekasan;
 - Juara II : UPT BP4 Pamekasan;
 - Juara III : UPT PSAWS Madura di Pamekasan.
- Pemasangan umbul-umbul dan spanduk .
- Upacara Bendera;
- Jalan – jalan sehat dan syukuran.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

a) Tujuan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dilingkungan Bakorwil Pamekasan dengan tujuan agar para pegawai dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik serta meningkatkan kinerja para pegawai.

b) Sasaran

Para pegawai di lingkungan Bakorwil Pamekasan.

c) Pagu dan Realisasi

Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 558.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 541.145.000,00 (96,84%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran

dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan

Terealisasinya pembelian kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit, pembelian meja dan kursi eselon II, rehab rumah dinas Kepala Badan, rehab ruang kerja eselon II, pengadaan laptop, PC, fieling cabinet, mesin ketik elektronik, mesin pemotong rumput.

4) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

a) Tujuan

Membantu meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di daerah, berupa kegiatan pasar murah.

b) Sasaran

Masyarakat miskin di daerah.

c) Pagu dan Realisasi

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual sebesar Rp. 169.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.192.500,00 (88,87) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan

Pasar murah dilaksanakan di Kabupaten Sampang pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan lokasi pembagian sebagi berikut :

- Pendopo Kabupaten Sampang dibagikan 2.000 paket dan 118 paket cadangan;
- 13 Kecamatan yang lain masing-masing sebanyak 284 paket.

Setiap paket sembako berisi :

- Beras (kualitas Premium) 5 Kg;
- Gula 2 Kg;
- Minyak Goreng 1 ltr;
- Mei Instan 10 Bungkus;
- 1 Refil Kecap Manis 600 ml.

Masing-masing paket sembako senilai Rp. 100.000,- dan 5.000 paket sembako yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp. 85.000,- disubsidi Bapak Gubernur Jawa Timur dan Rp. 15.000,- disubsidi Pemerintah Kabupaten Sampang.

5) Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

a) Tujuan

Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengembangan sarana dan prasarana

b) Sasaran

Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

c) Pagu dan Realisasi

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan sebesar Rp. 231.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 228.130.375,00 (98,68%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan

Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pembinaan lembaga masyarakat bidang pengairan, sarana perhubungan, pengembangan sarana dan prasarana serta tata ruang dan pengembangan wilayah.

23. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang prima kepada seluruh pengguna jasa layanan kepegawaian baik masyarakat umum maupun masyarakat pegawai negeri sipil serta institusi lainnya agar didalam pelayanan dapat lebih mudah, nyaman, lancar, dan ada kepastian hukum.

b) Sasaran

Sasaran program ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dengan memperbaiki dan mengevaluasi sistem dan mekanisme pelayanan (prosedur), penetapan waktu, syarat dan prasyarat serta evaluasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, meningkatkan kualitas SDM Aparatur pelayan serta menetapkan Standart Operasional Pelayanan Kepegawaian.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik total dana sebesar Rp 1.320.000.000,00 dengan realisasi Rp 1.317.307.353,00 (99,80%) yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik kolom 11)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian dalam rangka pemantapan pelayanan kepegawaian 2 (dua) kali;
- Terlaksananya pengembangan pelayanan melalui penerapan standart manajemen mutu sesuai ISO: 9001:2008, pelayanan satu pintu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO:9001:2008;
- Terlaksananya penyusunan laporan LAKIP, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran 2012, Laporan Evaluasi

dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Permasalahan dalam program peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

- Belum adanya standard pelayanan minimal (SPM) di bidang kepegawaian;
- Belum adanya persamaan persepsi didalam menafsirkan peraturan-perundangan undangan di bidang kepegawaian;
- Belum semua pelaksanaan program kegiatan direncanakan sesuai dengan indicator kinerja utama (IKU) dan cenderung pada penyerapan anggaran.

Upaya Pemecahan Masalah

- Melaksanakan koordinasi, dan evaluasi program dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian untuk bahan/masukan penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan pemantapan koordinasi, dan sosialisasi dalam rangka menyamakan persepsi dan kajian peraturan perundangan undangan di bidang kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja, laporan hasil kegiatan, dan evaluasi program dengan pihak terkait.

f) Penghargaan.

- Pada program ini mendapat penghargaan dari URS (United Registrar of System), Nomor: 42179/A/001/UK/EN yaitu sertifikasi ISO: 9001:2008 sebagai pelayanan yang baik dan memenuhi standart mutu manajemen.

- Gubernur Jawa Timur tanggal 11 April 2010, sebagai stand pameran pelayanan publik terbaik.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

a) Tujuan Program.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan system pengolaan dan penataan Sumber Daya manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya yang berprinsip *"In The Right Place and In The Right Man"* dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS di Jawa Timur.

b) Sasaran

Sasaran program ini yaitu penataan, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penataan system remunerasi, dan reward, berbasis kompetensi serta system pemberian sanksi.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur total dana sebesar Rp 5.278.600.600,00 dengan realisasi Rp 5.191.695.712,00 (98,35%) yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik kolom 11)

d) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- Rekomendasi keputusan dalam menentukan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Sosialisasi Penilaian/evaluasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Sosialisasi penilaian kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Penetapan keputusan kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pemberian sanksi/punishment kepada PNS berupa surat keputusan Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Permasalahan pada program pengelolaan SDM Aparatur antara lain:

- Adanya keterlambatan pengiriman usulan, disebabkan tidak lengkapnya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Belum adanya standart penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;
- Kurangnya pemahaman peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.
- Kurangnya kemauan bagi PNS yang akan purna tugas untuk diberi pelatihan dan pembekalan kewirausahaan.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlu adanya penetapan batas waktu pengusulan, dan sosialisasi persyaratan untuk kenaikan pangkat yang menggunakan sistem on line (komputer);
- Perlu adanya usulan standart yang baku penilaian kinerja bagi PNS dalam menentukan Sasaran Kerja PNS (SKP) bagi pejabat struktural dan PNS.
- Sosialisasi berkesinambungan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian .
- Sosialisasi tentang manfaat pembekalan, serta pemberian bantuan modal untuk digunakan wirausaha.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, keterampilan/keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, serta penyediaan informasi kepegawaian yang andal untuk pengembangan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b) Sasaran

Sasaran program ini yaitu peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Seleksi penerimaan CPNS melalui system CAT (Computer Assisted Test); Pemberian bantuan pelaksanaan penerimaan IPDN; Fasilitasi tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Pelaksanaan Ujian dinas; Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; Penyusunan Bezetting dan formasi PNS; Pengelolaan tata naskah file PNS/Digitelisasi data PNS;

c) Pagu dan Realisasi Program.

Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur total dana sebesar Rp 8.521.399.400,00 dengan realisasi Rp 7.932.758.960,00 (93,09%) yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik kolom 11)

d) Hasil Pelaksanaan Program

- Tersedianya SDM Aparatur yang handal sesuai dengan kebutuhan formasi dan pemetaan PNS;
- terselesainya Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2011 tentang tugas belajar dan Peraturan Gubernur Nomor: 71 tentang Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Tersedianya data kepegawaian yang andal dan ter up date (terbaru) di Jawa Timur;
- Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten melalui jalur formal (tugas belajar) S1, S2, dan S3 sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Tersedianya file pegawai perorangan secara digitalisasi dan fisik (arsip pegawai);
- Selesaiannya Keputusan Gubernur dalam pemrosesan pelanggaran kepegawaian;

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Pada kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS, setelah adanya Peraturan Bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Keuangan RI Nomor: 02/SPB/M-PAN-RB/8/2011, Nomor: 800-632 Tahun 2011, dan Nomor: 141/PML. 01/2011 tentang penundaan sementara penerimaan CPNS, maka BKD yang semula merencanakan seleksi penerimaan CPNS dengan Sistem CAT (Computer Assisted Test), maka kegiatan penerimaan CPNS tahun 2011 tidak dilaksanakan;
- Pada kegiatan penyusunan formasi dan bezetting atau pemetaan sampai dengan triwulan III belum selesai atau belum menghasilkan suatu dokumen formasi kepegawaian/pemetaan sebagai dasar pengadaan CPNS (selesai baru 80%), namun ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 hal ini disebabkan antara lain waktu yang diberikan untuk pemetaan, dan perhitungan kembali jumlah ideal PNS terlalu cepat/pendek.

Upaya Pemecahan Masalah

- Upaya untuk mengantisipasi Peraturan Bersama tiga Kementerian tersebut dalam rangka untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik,

perawat, maupun tenaga khusus antara lain yaitu penguatan kebijakan tentang Outsourcing dengan persyaratan yang ketat.

- Perhitungan kembali jumlah yang ideal untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui perhitungan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja serta pemetaan PNS.
- Pendidikan dan latihan bagi PNS untuk diarahkan menjadi tenaga fungsional/tenaga khusus antara lain juru tera, teraphis, instruktur, dan lain-lainnya.

24. BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Tujuan:

Meningkatkan kompetensi PNS sesuai dengan jenjang jabatan serta tugas pokoknya.

b) Sasaran :

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur total dana sebesar Rp 91.876.000.000,00 dengan realisasi Rp 77.130.106.045,00 (83,95%) yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik kolom 11)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Dari data alumni diklat pada Tahun 2010 jumlahnya mencapai 26.796 orang sedangkan pada tahun 2011 jumlah alumni hanya mencapai 18.174 orang sehingga terdapat penurunan jumlah peserta diklat sebesar 67,82%.

No	Nama Kegiatan	Jumlah Alumni	
		2010	2011
1	Diklat Kepemimpinan		
	Diklat Kepemimpinan Tk. II	393	448
	Diklat Kepemimpinan Tk. III	190	228
	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	216	214
2	Diklat Prajabatan		
	Prajabatan Golongan I	2.626	744
	Prajabatan Golongan II	13.376	8.417
	Prajabatan Golongan III	8.751	7.214
3	Diklat Teknis	734	394
4	Diklat Fungsional	510	515
	TOTAL	26.796	18.174

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Adanya penurunan jumlah peserta diklat terbanyak pada peserta Diklat Prajabatan, hal ini dikarenakan target Diklat Prajabatan dari Kabupaten/Kota banyak yang belum terealisasi karena ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum mendapat persetujuan dari DPRD dan dialihkan untuk Tahun 2012. Hal ini juga disebabkan adanya Kebijakan Moratorium sehingga tidak banyak peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan.
- Sarana dan Prasarana kampus belum sepenuhnya memadai.
- Terbatasnya Widyaiswara untuk diklat teknis dan diklat fungsional.
- Belum terpenuhinya target peserta disebabkan kesenjangan informasi antara pengelola diklat kabupaten/kota dengan instansi sasaran.
- Kurangnya koordinasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kediklatan belum berjalan optimal, disebabkan keterbatasan sarana teknologi informasi di instansi Kabupaten/Kota.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Untuk meningkatkan pelayanan sarana prasarana masih perlu ditingkatkan keberadaannya.
- Bekerjasama dengan instansi teknis untuk menyediakan widyaiswara diklat teknis dan fungsional
- Perlu koordinasi yang lebih intensif antara provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi target peserta diklat
- Mendorong pemanfaatan teknologi informasi, khususnya di kalangan lembaga pengelola diklat
- Menginformasikan kalender kegiatan diklat selama 1 tahun

f) Penghargaan yang Diterima

Sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV

2) Program Pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat.

a) Tujuan:

Meningkatkan kompetensi PNS sesuai dengan jenjang jabatan serta tugas pokoknya

b) Sasaran :

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan Diklat total dana sebesar Rp 2.534.000.000,00 dengan realisasi Rp 2.318.743.550,00 (91,51%) yang secara rinci realisasi anggaran serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik Kolom 11)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Laporan Perkembangan Hasil Belajar (Pre-Test dan Post Test) menunjukkan adanya perkembangan hasil belajar rata-rata 46,16%.
- Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.

Data laporan Evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari 17.726 orang responden yang berasal dari seluruh peserta Diklat, kecuali Diklat Kepemimpinan Tk. II. Adapun respon peserta terhadap indikator evaluasi penyelenggaraan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Evaluasi	Respon Peserta yang Menyatakan	Jumlah Peserta (orang & %)
1	Tingkat kesesuaian program diklat dengan harapan peserta	Sesuai	17.320 (97,71%)
2	Kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan diklat	Puas	16.347 (92,22%)
3	Kecukupan durasi penyelenggaraan diklat	Cukup	14.948 (84,33%)
4	Dukungan program diklat terhadap tugas peserta	Mendukung	15.589 (89,47%)
5	Manfaat diklat bagi peserta	Bermanfaat	17.240 (97,62%)
6	Materi yang dapat diserap peserta	Materi dapat diserap	14.775 (85,35%)

- **Laporan Evaluasi Pasca Diklat**

Evaluasi Pasca Diklat diperoleh dari data dampak diklat terhadap alumni diklat teknis dan fungsional yang diperoleh dari 350 orang responden (dengan teknik sampling) sebagai berikut :

No	Indikator	Respon yang menyatakan	%	Jumlah Alumni
1	Keikutsertaan Peserta Dalam Diklat	Berdasarkan kebutuhan instansi	71 %	248
		Karena Penugasan atasan semata	24 %	84
		Inisiatif Sendiri	5 %	18
2	Tugas Untuk menerapkan hasil diklat	Ya	84 %	294
		Tidak	16 %	56
3	Penerapan Materi Diklat Dalam Tugas	Sebagian besar	75 %	262
		Sebagian Kecil	19 %	67
		Seluruhnya	6 %	21
4	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	Menyusun	82 %	287
		Tidak Menyusun	18 %	63
5	Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut	Dilaksanakan tetapi kurang sesuai	58 %	203
		Dilaksanakan sesuai rencana	19 %	67
		Masih akan dilaksanakan	15 %	52

		Tidak dilaksanakan	8 %	28
6	Peran Materi Untuk Mengatasi Kesulitan di tempat kerja	Sebagian besar	56 %	196
		Sebagian Kecil	40 %	140
		Seluruhnya	3 %	11
		Tidak sama sekali	1 %	3
7	Dorongan untuk meningkatkan kinerja setelah diklat	Berpengaruh besar	81 %	283
		Berpengaruh kecil	11 %	39
		Tidak berpengaruh	8 %	28
8	Sosialisasi materi yang diperoleh dari Diklat	Ya, Sebagian besar	56 %	196
		Ya, Sebagian kecil	24 %	84
		Ya seluruhnya	19 %	67
		Tidak sama sekali	1 %	3
9	Pemanfaatan Hasil Diklat oleh Atasan, Teman Sejawat atau Bawahan	Ya, sebagian besar	47 %	165
		Ya, sebagian kecil	47 %	165
		Ya, seluruhnya	4 %	14
		Tidak sama sekali	2 %	6
10	Pengembangan Hasil Diklat di Tempat Kerja	Ya, tapi kurang optimal	44 %	154
		Ya, secara optimal	40 %	140
		Tidak sama sekali	16 %	56

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Belum terstandarnya pelaksanaan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota
- Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat berupa analisa kebutuhan diklat dan pasca diklat berupa evaluasi dampak diklat

Upaya Pemecahan Masalah/solusi/usulan tindak lanjut

- Meningkatkan kapasitas evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan diklat kabupaten/kota
- Perlunya sinkronisasi dan integrasi kebijakan antar level pemerintahan melalui sistem yang terpadu mengenai berbagai hal tentang

kediklatan, khususnya hal-hal yang menjadi isu strategis dan fokus peningkatan SDM aparatur;

- Perlunya pengembangan sistem manajemen diklat aparatur yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, pola karier PNS dan siklus diklat aparatur;
- Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur di Jawa Timur melalui diklat-diklat yang didasarkan pada analisis kebutuhan yang cermat dan akurat
- Perlunya memperkuat jejaring kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan diklat dan pengawasan diklat.

f) Penghargaan yang Diterima.

Sertifikasi Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

25. KORPRI

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a) Tujuan

Mewujudkan fungsi lembaga dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lain serta lembaga yang kokoh dan optimall, diarahkan ke seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

b) Sasaran

- Fasilitasi Peningkatan Kualitas Fungsi dan Peran lembaga legislatif
- Fasilitasi Pemberdayaan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta Organisasi Keagamaan
- Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat agar dapat menerapkan Budaya Politik Demokratis

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi Rp. 299.501.340,00 (99.83%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Terwujudnya Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data dengan adanya Pendataan Jumlah Anggota KORPRI se Jawa Timur Tahun 2011
- Terwujudnya pelaksanaan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu penyusunan materi Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS sebanyak 1000 buku, yang disampaikan saat pembinaan anggota KORPRI.
- Terwujudnya pelaksanaan kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, yaitu terlaksananya Penyusunan materi

Jiwa Korsa dan Kode Etik serta tercetaknya 1.000 ekspl untuk disampaikan pada Prajabatan gol III CPNS Provinsi Jawa Timur

- Terwujudnya pelaksanaan kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan Sosialisasi dan Monitoring Program KB bagi anggota KORPRI Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 80 Orang

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Belum tercapainya pelaksanaan kerjasama yang optimal dengan hasil yang memuaskan antar SKPD terkait baik secara Regional, Nasional maupun Internasional.

Upaya Pemecahannya :

Tersedianya dana pendukung yang optimal agar pelaksanaan program seperti yang telah dicanangkan dapat mencapai hasil baik dan terpenuhinya kesejahteraan anggota dan keluarga KORPRI khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

a) Tujuan

Meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b) Sasaran

- Penataan kembali Sumber Daya Manusia Aparatur Dewan Pengurus KORPRI/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai kebutuhan akan jumlah dan kompetensinya.
- Penambahan pengetahuan, ketrampilan, dedikasi dan loyalitas sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat.

- Peningkatan dan penyaluran bakat serta minat anggota KORPRI
- Evaluasi kinerja eksistensi KORPRI sebagai tempat menghimpun diri Pegawai Negeri

c) Pagu dan Realisasi

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pagu anggaran sebesar Rp. 3.830.000.000,00 dengan realisasi Rp. Rp. 3.700.872.940,00 (96.63%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

- Penguatan Kelembagaan KORPRI, dengan melaksanakan Rakor Penguatan Kelembagaan KORPRI dengan peserta 80 orang Kab/Kota, 100 orang dari Unit Dewan Pengurus KORPRI SKPD/Lembaga/Instansi Vertikal bermaksud terbentuknya Kepengurusan KORPRI unit di jajaran Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur, Dewan Pengurus/ Sekretariat Kab/Kota Se Jawa Timur serta pelaksanaan ziarah oleh 30 SKPD/Dewan Pengurus/Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Jawa Timur dengan peserta \pm 1000 orang dan upacara HUT KORPRI dengan peserta/undangan \pm 6000 orang.
- Penilaian Profesionalisme Award, dengan melaksanakan penilaian atas kinerja Aparatur Negara se Jawa Timur dengan perolehan penilaian terbaik yang diberikan penghargaan kepada 5 (lima) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dan 5 (lima) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Pembinaan anggota KORPRI ,dengan mengadakan Rapat Koordinasi dengan SKPD di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Hotel Cendana pada Bulan Maret Tahun 2011 dan di Hotel

Utami pada Bulan Juli Tahun 2011serta mengadakan bimbingan belajar putra dan putri anggota KORPRI, lomba cerdas cermat anggota KORPRI SKPD Provinsi Jawa Timur.

- Fasilitasi Pendampingan Anggota KORPRI yang bermasalah dengan mengadakan rakor fasilitasi pendampingan anggota KORPRI yang bermasalah hukum dengan peserta Dewan Pengurus KORPRI SKPD/Instansi Vertikal Jawa Timur/Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Daya Apresiasi dan Kreasi Seni Aparatur, dengan pelaksanaan Lomba Menyanyi Lagu Keroncong, Lomba Paduan Suara antar SKPD di Jawa Timur yang pemenangnya diberi hadiah juara I s/d VI serta wayang kulit.
- Peningkatan Kesejahteraan Jasmani, dengan pelaksanaan Lomba Bola Volley dan Senam KORPRI antar SKPD Provinsi Jawa Timur yang pemenangnya diberi hadiah juara I s/d VI dan Jalan Sehat di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur dengan peserta ± 5000 orang dan diberi door prize kepada 75 orang.
- Peningkatan Kualitas Kinerja KORPRI, dengan melaksanakan Rapat Koordinasi SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kualitas kinerja anggota.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya :

Permasalahan

Belum terwujudnya penataan Dewan Pengurus Unit SKPD Provinsi Lembaga/Instansi Vertikal Jawa Timur, Dewan Pengurus/Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, peningkatan Kinerja dan pengembangan bakat seni/olahraga serta Jiwa Korps Pegawai Negeri.

Upaya Pemecahannya

- Melakukan pendataan pegawai, yang meliputi jenis kepangkatan dan pendidikan Putra (i) anggota KORPRI.

- Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi kepada Dewan Pengurus SKPD/Instansi Vertikal Provinsi Kabupaten/Kota tentang kelembagaan/peraturan-peraturan ke KORPRI an.
- Kerjasama dengan pihak 3 (ketiga) untuk meningkatkan kesejahteraan, bakat dan Ketrampilan anggota
- Memberikan fasilitasi, konsultasi kelembagaan KORPRI dan pendampingan terhadap masalah hukum anggota KORPRI.